

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. & Lanontji, M. “Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia.” *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), (2021): 52-71.
- Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Tangerang Selatan: Indocamp, 2018.
- Anonim, “Perguruan Tinggi Eks BHMN Hadir Kembali dengan Casing Baru”, 31 Oktober 2013, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/3952/Perguruan-Tinggi-Eks-BHMN-Lahir-Kembali-dengan-Casing-Baru.html>, diakses pada 14 Februari 2025.
- Aziz, Umar Abdul. “Analisis Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UGM Tahun 2013-2015”, (Skripsi Sarjana Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2015).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNMPAM PRESS, 2019.
- Badan Pusat Statistik, “Indikator Pendidikan 1994-2024”, 9 Desember 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan-1994-2024.html>, diakses pada 21 Februari 2025.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Dikti. *Bahan Konferensi Pers Uang Kuliah Tunggal*. 2013.

Ervan dan Alam, “UKT Undip Tahun 2020 Naik”, 5 Mei 2020, <https://lpmedentsundip.com/ukt-undip-tahun-2020-naik/>, diakses pada 16 November 2024.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Firnanda, Muhammad Hanif. “Analisis Kebijakan Sistem Uang Kuliah Tunggal Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 (Studi Kasus di Universitas Gadjah Mada)”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015).

H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. : Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker”, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>, diakses pada 16 Februari 2025.

Ismail, Wekke Suardi. Dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

JatengPosTV, “Rektor UNDIP Blak-blakan soal UKT dan Kecilnya Anggaran Pendidikan”, 22 Juni 2024, [https://youtu.be/5\\_miSa-RR2c?si=wu5uuZhZ2EwQ7-rH](https://youtu.be/5_miSa-RR2c?si=wu5uuZhZ2EwQ7-rH), diakses pada 30 Mei 2025.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT”, 27 Mei 2024,

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/05/mendikbudristek-batalkan-kenaikan-ukt>, diakses pada 16 Februari 2025.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Bahan Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi*. 2024.

Komnas HAM. *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No 13: Hak untuk Menikmati Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.

\_\_\_\_\_. *Pendidikan untuk Semua: Advokasi terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.

\_\_\_\_\_. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Kurniatun, Taufani Chusnul dan Liah Siti Syarifah. *Perencanaan Pendidikan dan Peran Pendidikan Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)*. Bandung: Indonesi Emas Group, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Aswanto Bahas Perbedaan HAM dengan Hak Konstitusional”, 19 Maret 2022  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18058&menu=2>,  
diakses pada 16 Februari 2025.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Munadi, Muhammad dan Barnawi. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pahlevi, Reza. “Cek Data: Akar Masalah Mahalnya UKT di PTN”, 12 Juni 2024, <https://katadata.co.id/cek-data/6668ee2b3e5a5/cek-data-akar-masalah-mahalnya-ukt-di-ptn>, diakses pada 13 Maret 2025.
- Purnomo, Agus dan Saifullah. “Tinjauan Utilitarianisme Hukum atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2), (2022): 229-40.
- Puslapdik Kemendikdasmen, “Upaya Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi”, 31 Juli 2024, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/upaya-meningkatkan-apk-pendidikan-tinggi/>, diakses pada 21 Februari 2025.
- Putra, Galih R. N. *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1 (2), (2024): 77-84.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Rosyidah, Shofiyyatur. “Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).

- Saputra, Achmad Nuryana dan Supratiwi. “Evaluasi Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) (Studi Kasus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang).” *Journal of Politic and Government Studies* 14 (2), (2025): 335-354.
- Setiawan, Endrianto Bayu. “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara.” *Lex Renaissance* 9(2), (2024): 394-422.
- Sofiani, Triana. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilo, Joko. “Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi Restrukturalisasi Institusi dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini, Studi Pasca PTN-BH UGM 2012-2020”, (Skripsi Sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2021).
- Tempo, “UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan”, 11 Juni 2024, <https://www.tempo.co/politik/ukt-naik-kpk-singgung-kesenjangan-subsidi-ptn-dan-sekolah-kedinasan-50275>, diakses pada 29 Mei 2025.
- Tomasevski, Katarina. *Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global*. Jakarta: Ditjen PTPMK dan UNESCO, 2005.

United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/2024*.

New York: UNDP, 2024.

Universitas Diponegoro. “Siaran Pers UKT 2024”, 27 Mei 2024,

[https://www.instagram.com/p/C7edUJ6J2Ua/?img\\_index=1&igsh=MTJveHNi dGhrdzg3dA==](https://www.instagram.com/p/C7edUJ6J2Ua/?img_index=1&igsh=MTJveHNi dGhrdzg3dA==), diakses pada 7 Juni 2025.

Biro Statistik BEM Universitas Diponegoro. *Survei Ketepatan Sasaran Golongan*

*UKT*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2024.

Wajdi, Farid dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS, 2016.

Winurini, Sulis. “Catatan Permasalahan Pengelolaan Anggaran Perguruan Tinggi”.

*Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 22 Juni 2024.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widyia Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027  
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 211 /UN7.A2/TU/IV/2025

14 APR 2025

Perihal : Pemberian Izin

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 592/UN7.F1/AK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Permohonan Riset/ Penelitian, dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) bagi mahasiswa,

nama : Selvia Mia Aurelia Sagala

NIM : 11000121130315

fakultas : Hukum

judul Skripsi : Analisis Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap Keterjangkauan Akses Pendidikan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Diponegoro).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat izin berlaku sejak tanggal dibuat sampai dengan penelitian selesai
2. Lokasi penelitian di lingkungan Kampus Universitas Diponegoro
3. Izin hanya untuk kegiatan mencari data/ bahan penyusunan tugas skripsi
4. Informasi dan data yang diberikan hanya dalam bentuk angka dan statistik
5. Hanya untuk keperluan akademik/ tidak di publikasikan keluar.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :  
Rektor

a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,  
  
Dc. Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt.  
NIP 197405101998021001